



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

PELAKSANAAN FUNGSI EVALUASI KINERJA  
PENGURUS ORGANISASI IKATAN QORI'  
QORI'AH MAHASISWA (IQMA)  
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Surabaya Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)

Oleh:

**Eka Laylatun Nisvi**  
**NIM. B94216043**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**  
**SURABAYA**

**2020**

## LEMBAR PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Laylatun Nisvi

NIM : B94216043

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada Lembaga Pendidikan tinggi manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun
2. Skripsi ini adalah murni hasil karya penulis secara mandiri dan bukan hasil plagiasi karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya
3. Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan skripsi ini sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi

Surabaya, 27 Februari 2020

Yang menyatakan,



**Eka Laylatun Nisvi**  
**NIM. B94216043**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Eka Laylatun Nisvi  
NIM : B94216043  
Fakultas/Prodi : Dakwah dan Komunikasi/Manajemen Dakwah  
Judul : Pelaksanaan Fungsi Evaluasi Kinerja Pengurus  
Organisasi Ikatan Qori' Qori'ah Mahasiswa  
(IQMA) UIN Sunan Ampel Surabaya

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 27 Februari 2020

Menyetujui,  
Pembimbing



**Bambang Subandi, M.Ag**  
NIP. 197403032000031001

## LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi oleh Eka Laylatun Nisvi telah dipertahankan dan dinyatakan lulus oleh tim penguji.

Surabaya, 12 Maret 2020

Mengesahkan  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,

H. Abd. Halim, M.Ag  
NIP. 196307251991031003

Penguji I

Bambang Subandi, M.Ag  
NIP. 197403032000031001

Penguji II

Dra. Imas Maesaroh, Dip.I, M.Lib-M.Lib, Ph.D  
NIP. 196605141992032001

Penguji III

Ahmad Khairul Hakim, S/Ag, M.Si  
NIP. 197512302003121001

Penguji IV

Airlangga Bramayudha, MM  
NIP. 197912142011011005

# LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH



## KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : EKA LAYLATUM NISVI  
NIM : B94216043  
Fakultas/Jurusan : DAKWAH DAN KOMUNIKASI / MANAJEMEN DAKWAH  
E-mail address : nisvi.ilayla@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PELAKSANAAN FUNGSI EVALUASI KINERJA PEMERUS ORGANISASI  
KATAH QORI QOLIAH MAHASISWA (IQMA) UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Juni 2020

Penulis

(EKA LAYLATUM NISVI)  
nama terang dan tanda tangan





















































Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka teori untuk menghubungkan dua definisi pokok yang menjadi fokus penelitian. Kemudian, dua definisi pokok tersebut dihubungkan dengan Ilmu Manajemen. Evaluasi kinerja merupakan proses memberikan nilai terhadap kinerja individu. Dalam Ilmu Manajemen, evaluasi merupakan istilah yang ada dalam fungsi-fungsi manajemen. Kegiatan mengevaluasi merupakan bagian dari salah satu fungsi manajemen, yaitu pengawasan (*controlling*).

Pengawasan digunakan untuk mencari isu-isu hasil kinerja pengurus. Hal tersebut dilakukan untuk dijadikan bahan informasi dalam pelaksanaan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja berkaitan dengan individu. Dalam Ilmu Manajemen, individu termasuk sumber daya manusia (*Human Resources*) yang dimiliki oleh organisasi. Jika sumber daya manusia dikaitkan dengan unsur-unsur manajemen, maka sumber daya manusia merupakan salah satu unsur-unsur manajemen, yaitu *Man* (manusia).

Manusia merupakan faktor penentu dari kualitas kinerja yang dihasilkan. Oleh karena itu, hasil dari manajemen penelitian ini adalah efisiensi. Sebab, evaluasi kinerja dapat memperbaiki kinerja pengurus. Sehingga, pengurus tersebut dapat bekerja dengan tepat dan memberikan hasil sesuai dengan rencana organisasi.

## **C. Kajian Teori**

### **1. Pengertian Evaluasi Kinerja**

Evaluasi dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja juga dapat dikatakan sebagai penilaian kinerja. Evaluasi atau penilaian kinerja merupakan kegiatan mengidentifikasi, menilai, dan mengelola hasil kerja





















berikut:<sup>45</sup> *Pertama*, membentuk tim. Pelaksanaan evaluasi kinerja harus memiliki tim tersendiri. Hal tersebut dilakukan agar hasil dari evaluasi kinerja dapat diterima dan dipahami bersama. Adapun tim evaluasi kinerja tersebut meliputi profesionalis SDM, manajer SDM, *supervisor*, dan wakil karyawan.

*Kedua*, analisis pekerjaan. Hasil dari analisis pekerjaan berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilakukan oleh karyawan. Analisis pekerjaan dapat digunakan untuk menyusun dan mendefinisikan pekerjaan. Selain itu, analisis pekerjaan juga digunakan untuk menyusun system penilaian atau evaluasi kinerja. *Ketiga*, penentuan tujuan penilaian kinerja. Tujuan evaluasi kinerja digunakan untuk menilai hasil kerja karyawan. Hal tersebut berkaitan dengan kemampuan, sikap, atau perilaku karyawan. *Keempat*, penentuan dimensi kinerja. Dimensi kerja mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, seperti hasil kerja, perilaku kerja, dan sifat karyawan.

*Kelima*, penentuan standar kinerja. Evaluasi kinerja merupakan proses penilaian kinerja karyawan yang dibandingkan dengan standar kinerja. Oleh sebab itu, standar kinerja harus ditentukan sebagai tolak ukur kinerja karyawan. *Keenam*, mengembangkan formulir PA. Formulir PA diberikan kepada karyawan yang dinilai untuk dimintai persetujuan. Pengembangan formulir PA tersebut dilakukan setelah proses pembobotan.

*Ketujuh*, membuat prosedur skoring. Prosedur skoring digunakan untuk memberikan nilai kinerja kepada karyawan. Prosedur skoring membantu

---

<sup>45</sup> Qurrotu Ayun, "Penilaian Kinerja (*Performance Appraisal*) Pada Karyawan Di Perusahaan", *Jurnal Majalah Ilmiah Informatika*, (Vol. 2, No. 3, 2011), 81-84.



















## 1. Tahap Pra Lapangan

Dalam tahap pra lapangan, peneliti melakukan beberapa tahapan sebagai berikut: *Pertama*, peneliti menyusun rancangan penelitian. Pada tahap ini, peneliti memulai dengan membuat matriks. Selanjutnya, matriks tersebut diserahkan kepada dosen pembimbing, agar peneliti diberikan arahan untuk membuat proposal skripsi. Setelah diberi arahan, peneliti mulai membuat proposal skripsi yang berkaitan dengan fokus dan objek penelitian. *Kedua*, peneliti menentukan lokasi penelitian. Pada tahap penentuan lokasi penelitian, peneliti mengambil lokasi penelitian di organisasi Ikatan Qori'Qori'ah Mahasiswa (IQMA) UIN Sunan Ampel Surabaya.

*Ketiga*, peneliti mengurus surat perizinan untuk penelitian. Fungsi dari surat izin penelitian adalah untuk mendapatkan izin melakukan penelitian di organisasi IQMA. Setelah mendapatkan surat izin, peneliti langsung dapat melakukan penelitian di organisasi IQMA. *Keempat*, peneliti melakukan peninjauan dan penilaian terhadap lapangan. Hal tersebut dilakukan untuk mengenal dan menilai situasi dan kondisi di organisasi IQMA. Dalam hal ini, peneliti harus mempersiapkan segala keperluan yang berkaitan dengan penelitian.

*Kelima*, peneliti melakukan pemilihan dan pemanfaatan informan. Pada saat memulai penelitian, peneliti memilih informan yang memiliki pemahaman terhadap fokus penelitian ini. Peneliti memanfaatkan beberapa informan, seperti tiga Pengurus Harian (PH) dan tiga pengurus Departemen Pembinaan dan Pemberdayaan Kader (DP2K). Informan tersebut merupakan penanggung jawab pelaksanaan evaluasi kinerja pengurus di organisasi IQMA.









yang ada di lapangan, kemudian menyusun data berdasarkan dengan sumbernya. *Kedua*, peneliti membaca keseluruhan data. Tahap ini digunakan untuk membangun pengertian umum atas informasi yang diperoleh. Kemudian, memahami makna informasi tersebut secara keseluruhan. Peneliti juga menulis catatan khusus apabila diperlukan

*Ketiga*, peneliti melakukan *coding* data. peneliti mengolah informasi dari data yang diperoleh. Kemudian, informasi tersebut dibagi ke dalam kategori-kategori tertentu. Hal tersebut dilakukan sebelum memberi makna pada informasi tersebut. *Keempat*, peneliti mendeskripsikan *setting*. Peneliti menerapkan *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori, dan tema yang akan dianalisis. Pada proses deskripsi ini harus menggunakan penyampaian secara detail.

*Kelima*, peneliti menarasikan hasil penelitian. Hasil penelitian dideskripsikan dengan menggunakan metode naratif, meliputi tema-tema, kronologi peristiwa, dan perspektif khusus. *Keenam*, peneliti melakukan interpretasi makna. Tahap ini merupakan tahap untuk memaknai data hasil penelitian. Peneliti membandingkan data hasil penelitian dengan teori. Hal tersebut digunakan untuk menghasilkan teori baru atau menyangkal teori yang sudah ada.

















tersebut tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Hal ini dinyatakan langsung oleh informan 1, 3, 4, dan 6 sebagai berikut:

Kalau konsep dasar untuk pelaksanaan evaluasi itu kita bisa mengacu di AD/ART yang sudah ditetapkan di .. AD/ART nya IQMA. Nah itu pelaksanaan prosedur dan konsep dasar yang dilaksanakan mengenai tentang evaluasi bidang, triwulan, maupun MTI itu sudah .. tertata rapi di AD/ART IQMA itu sendiri. (...) Misalkan yang contoh di AD/ART itu ya, kana da tupek tupoksi (tugas pokok organisasi) nah itu sudah dipaparkan sangat panjang di AD/ART dan contohnya misal, tugas bendahara itu .. mengatur dan mengelola keuangan organisasi. (I.1)

Acuan dasar itu kita melihat di AD/ART ee itu tempatnya di pembagian tupoksi/jobdesk pengurus. dimana nanti setiap pengurus itu ditanyakan mengenai jobdisk terlebih dahulu dan setelah itu adal ada diadakannya evaluasi pengurus.(I.3)

Ya, konsep dasarnya di IQMA itu memang AD/ART anggaran .. dana dan anggaran rumah tangga. Jadi itu biasanya AD/ART itu dibahas ketika MTI musyawarah tahunan IQMA itu, jadi pembahasannya itu mungkin nggak apa ya nggak secepat mungkin membahas tentang itu, jadi AD/ART tu bener-bener kayak kita melaksanakan kepengurusan itu ya kita ambilnya sesuai dengan AD/ART itu tadi.(I.4)

(...) setiap pengurus kan memiliki tugas masing-masing eee dari pengurus departemen, PH, pengurus bidang itu kan tugasnya berbeda-beda, yang sudah kita .. yang sudah dibahas di awal ee .. di AD/AR .. AD/ART IQMA.(I.6)

Dalam hal ini, informan 1, 3, 4, dan 6 menjelaskan, bahwa pendefinisian pekerjaan sudah termuat dalam AD/ART. Menurut empat narasumber tersebut, acuan dasar mengenai tupoksi pengurus terletak di AD/ART. Selain berdasarkan AD/ART, standar tugas pengurus juga terletak di program kerja IQMA. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada saat pelaksanaan MTI. Selain dituntut memahami jobdesk, pengurus juga dituntut untuk menyusun program kerja selama kepengurusannya. Program kerja tersebut berkaitan dengan tujuan dari organisasi IQMA. Program kerja sudah dijelaskan di bagian pola tata kerja dalam AD/ART. Penyusunan dan penetapan program kerja dilakukan di kegiatan musyawarah kerja. Program kerja tersebut disusun oleh masing-masing lini kepengurusan. Penyampaian AD/ART dilakukan pada saat evaluasi tahunan, yaitu musyawarah tahunan IQMA (MTI). Pembahasan tersebut memakan waktu yang lama. Hal tersebut dikarenakan, penjelasan definisi pekerjaan harus dilakukan secara teliti. Sebab, pembahasan definisi kerja menentukan keberhasilan kinerja pengurus IQMA.

Pembahasan tersebut dilakukan secara berurutan mulai dari tupoksi ketua umum sampai pengurus bidang. Pada saat pembahasan, calon pengurus baru diajak untuk mengkaji ulang pola tata kerja organisasi. Hal tersebut dilakukan untuk melatih pemahaman dan kecakapan calon pengurus dalam

mengkaji pekerjaan. Calon pengurus dituntut untuk dapat memahami pola tata kerja organisasi IQMA. Apabila calon pengurus tersebut terpilih ke dalam struktur kepengurusan yang baru, maka calon pengurus tersebut dapat memahami tupoksi pada jabatannya. AD/ART juga memuat penjelasan tentang fungsi pengurus secara struktural maupun fungsional. Hal tersebut membantu memberi pemahaman kepada calon pengurus mengenai struktur kepengurusan di organisasi IQMA. Sebagaimana pernyataan salah satu informan sebagai berikut:

(...) di kepengurusan itu kan ada dua fungsi, ada yang namanya ee pengurus secara struktural dan pengurus secara fungsional. Kalau pengurus secara struktural maka dia harus menuruti ee garis struktural yang ada, garis koordinasinya gimana garis instruksinya kayak gimana, tapi kalau ee pengurus secara fungsional maka ya sesama pengurus ya harus pokoknya bagaimana mengayomi IQMA gitu lah, secara general kayak gitu.(I.2)

Informan kedua menjelaskan aturan garis koordinasi kepengurusan di IQMA. Hal tersebut digunakan untuk acuan dalam berkoordinasi. Masing-masing jabatan di IQMA bekerja dengan saling bekerjasama. Menurut penjelasan informan kedua, fungsi struktural digunakan untuk saling berkoordinasi antar pengurus. Antar pengurus saling berkoordinasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Pada umumnya, kerja sama dilakukan dengan jalan pembagian tugas. Hal tersebut dilakukan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan maksimal. Pembagian tugas tersebut harus



pengurus masing masing lini itu punya nilai tersendiri, misalkan dari hasil bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu kan ada ee peningkatan atau tidak peningkatan atau tidak mengenai pengurus yang hadir di evaluasi bidang itu, nah itu satu atau dua satu dua atau tiga pengurus atau hadir semua itu sudah mempunyai nilai masing-masing. Itu seperti itu. Nah yang tahapan non tes itu misalkan seperti contoh misalkan ada pengurus A itu yang mempunyai .. punya masalah dengan pengurus B, sehingga melalui permasalahan itu dengan adanya permasalahan itu ngaruh ke organisasi di IQMA.(I.1)

(...) kasus-kasusnya apa aja yang perlu dieval itu ada, jadi kita kita generalkan saja seperti itu.(I.2)

Kalau tesnya tersebut yaitu dari pihak DP2K itu ada form penilaian bagi pengurus yaitu kalau bagus itu DP2K menilai angka 3, kalau sedang itu 2, dan kalau jelek atau iya jelek itu 1. Lah kalau non tes itu dari pihak ketua 1 ataupun DP2K itu menilai langsung, o ternyata adek-adek itu adek-adek pengurus itu karakternya kurang bagus dan lain sebagainya, nah itu non tes.(I.3)

Kalau caranya itu kami menggunakan data menggunakan form ya form untuk melihat itu tadi kayak potensi dan juga bagaimana kinerjanya pengurus itu tadi gitu. Jadi ada tiga point lah ada point satu point dua point tiga nah itu nanti kita .. kita nilai kinerjanya mereka, sekiranya mereka kinerjanya baik cukup atau kurang gitu.(I.4)





formulir tersebut, ada beberapa poin berkaitan dengan penilaian pengurus. Penilaian tersebut meliputi kecakapan pengurus, kemampuan pengurus, kedisiplinan pengurus, dan kelayakan pengurus dalam menjalankan tugas. Formulir penilaian tersebut juga berkaitan dengan anggota bidang. Dalam hal itu, suksesnya anggota bidang merupakan tanggung jawab pengurus bidang. Jadi, hal tersebut dicantumkan di formulir penilaian hasil kerja pengurus bidang. Pengurus akan dinilai oleh DP2K. Adapun nilai yang digunakan, yaitu nilai 1, 2, dan 3. Nilai tersebut diurutkan dari terendah sampai terbaik. Perkembangan nilai tersebut akan diakumulasi tiap akhir bulan. Namun, penilaian tersebut hanya dilakukan pada pengurus bidang. Pengurus departemen dan PH tidak mendapatkan penilaian. Hal tersebut dikarenakan, penilaian tersebut digunakan untuk bahan evaluasi bulanan yang menjadi tanggung jawab DP2K. Adapun evaluasi bulanan tersebut merupakan evaluasi khusus untuk pengurus bidang. Jadi, kesimpulannya adalah metode tes tersebut hanya digunakan untuk evaluasi pengurus bidang. Sedangkan, pengurus departemen dan PH tidak menggunakan tes.

Berdasarkan pengamatan peneliti, metode non tes diperoleh dari hasil pengamatan maupun observasi. Metode non tes diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh ketua I dan DP2K. Pengamatan tersebut berkaitan dengan hasil kerja pengurus. Selain itu, pengamatan tersebut juga digunakan untuk melihat kemampuan pengurus di bidang yang lain. Hasil informasi ini akan digunakan untuk bahan dalam melakukan evaluasi kinerja. Adapun penjelasan informan mengenai pengumpulan data non tes sebagai berikut:

Itu sebetulnya sudah dikantongi oleh ketua 1 sebagai pemantau kegiatan kepengurusan tersebut yang nantinya akan diflorkan dan akan di evaluasi bareng-bareng di triwulan, bahannya dari ketua 1 dan DP2K biasanya.(...) menyambung dari argument saya yang tadi ya, jadi kan begini awalnya kita ada target tiga bulan sekali, lah sss selama tiga bulan pertama ini contoh kita ambil tiga bulan pertama biar nggak jauh jauh. Tiga bulan pertama ini nanti dari bulan pertama sampai bulan ketiga itu ketua 1 akan memantau kinerja pengurus, DP2K akan memantau kinerja pengurus bidang dan anggota. Lah itu nanti yang jadi bekal awal apa yang perlu dievaluasi untuk di triwulan kayak gitu. (I.2)

Yaa ... yang dilakukan oleh DP2K dan ketua 1 itu yang pertama DP2K itu menanyakan ke internal bidang mengenai siapa sih pengurus yang tidak aktif, ee terus DP2K itu mendata siapa saja pengurus yang tidak aktif dan anggota yang tidak aktif baru ee musyawarah dengan PH khususnya juga ke ketua 1. Lha oleh ketua 1 nanti diadakanlah evaluasi bulanan tersebut yaitu apasih kendala kok bisa terjadi hal seperti itu.(I.3)

Nah, tahapannya pertama memang dari .. dari kami dari DP2K itu .. tau tentang masalah-masalah yang harus dieval yang harus dibahas di evaluasi bidang yang satu bulan itu tadi itu tau dari beberapa pihak dan dari banyak pihak. Nah itu tadi nanti sebelum kita mengadakan evaluasi bidang, kita itu ee berkolaborasi dank k koordinasi dengan ketua 1. Ketua 1 itu yang menaungi internal yang ada di



diflorkan pada saat evaluasi bulanan. Selain sebagai bahan evaluasi bulanan, data tersebut juga digunakan untuk evaluasi triwulan dan MTI. Penjelasan di atas dikhususkan untuk pengurus bidang, sedangkan pengurus departemen dan PH akan ditinjau langsung oleh ketua I. Hal tersebut dikarenakan, ketua I memiliki tanggung jawab dalam internal organisasi. Bahan yang sudah ada digunakan untuk membantu pengurus menyelesaikan permasalahan atau kekurangannya. Biasanya, permasalahan bidang akan diselesaikan terlebih dahulu oleh pengurus bidang masing-masing. Hal tersebut juga berlaku untuk pengurus departemen. Apabila, pengurus bidang maupun pengurus departemen tidak bisa mengatasi permasalahan tersebut, maka permasalahan tersebut akan diselesaikan pada saat evaluasi triwulan. Khusus bidang, permasalahan akan diselesaikan dahulu di evaluasi bulanan. Setelah dibahas di evaluasi bulanan dan triwulan, permasalahan tersebut akan dipertanyakan kembali pada saat MTI. Hal itu dilakukan untuk menuntaskan permasalahan dan mencari pengembangan untuk masa yang akan datang. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan informan ketiga sebagai berikut:

(...) kalau seumpamanya dari pengurus bidang karena pengurus bidang di IQMA itu ada jabatan tersendiri, dari ketua a dari koordinator dan sampek eksternal. Lha jika ada evaluasi yaitu dari segi pengurus yaitu internal bidang terlebih dahulu untuk mengevaluasi. Lha kalau seumpama internal bidang itu tidak sanggup maka larinya ke DP2K, lha setelah DP2K untuk mengevaluasi pengurus tersebut dan tetap tidak berubah maka larinya ke ketua 1, setelah ketua 1 tetap maka larinya ke ketua



triwulan itu yang dieval seluruh pengurus dengan intensitas tiga bulan sekali .. he,em jadi tiga bulan sekali kepengurusan itu dieval, terus yang ketiga adalah evaluasi MTI (musyawarah tahunan IQMA) di situ kita mengevaluasi setahun periode kita bagaimana kinerjanya dan lain sebagainya dan juga sebagai laporan pertanggungjawaban satu periode.(I.2)

(...) dikarenakan IQMA itu setiap tiga bulan itu ada triwulan yaitu evaluasi pengurus selama tiga bulan, nah terus di akhir periode itu ada yang namanya MTI musyawarah tahunan IQMA, itu pun juga mengupas tuntas mengenai ya evaluasi pengurus selama satu tahun ee dimana ee disetiap tiga bulan itu triwulan nanti ada kontroling dari khususnya dari ketua 1 untuk ... ee men gee perkembangan evaluasi tersebut.(I.3)

Tipe evaluasinya di IQMA itu ada tiga tipe, yang pertama itu bulanan ee setiap bulan, yang kedua itu tiga bulan sekali, dan yang ketiga itu langsung di akhir kepengurusan.(I.4)

karena setiap perbulannya dari DP2K itu melakukan evaluasi satu bulan satu kali terhadap pengurus bidangnya, terus nanti kita juga ada triwulan yang mana tiga bulan sekali mengevaluasi semua kinerja pengurus IQMA, dan diakhir kepengurusan nanti ada musyawarah tahunan IQMA yang dimana mengevaluasi satu tahun kepengurusan tersebut.(I.5)

Dari penjelasan informan 2, 3, 4, dan 5 diketahui, bahwa IQMA memiliki tiga macam pelaksanaan

evaluasi kinerja. Tiga pelaksanaan tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Adapun jenis evaluasi kinerja tersebut meliputi evaluasi bulanan, evaluasi tiga bulan (triwulan), dan evaluasi tahunan atau musyawarah tahunan IQMA (MTI). Masing-masing evaluasi tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Evaluasi bulanan digunakan untuk menilai perkembangan kinerja pengurus bidang jangka pendek, yaitu tiap bulan. Hal tersebut dilakukan, agar pengurus bidang sudah mengalami perbaikan kinerja saat evaluasi triwulan diadakan. Evaluasi triwulan tersebut digunakan untuk meninjau kinerja pengurus selama tiga bulan. Evaluasi triwulan juga membantu menindaklanjuti hasil dari evaluasi bulanan. Sedangkan, evaluasi tahunan atau MTI digunakan untuk mengulas balik kinerja pengurus selama satu tahun. Pada saat MTI, masing-masing pengurus harus menuntaskan kekurangannya dalam mengembang tugas. Hal tersebut dilakukan, agar pengurus tidak menanggung beban.

Dalam pelaksanaannya, evaluasi bulanan, triwulan, dan MTI memiliki penanggung jawab yang berbeda. Evaluasi bulanan merupakan kegiatan di bawah tanggung jawab DP2K (Departemen Pembinaan dan Pemberdayaan Kader). Sedangkan, triwulan dan MTI merupakan kegiatan di bawah tanggung jawab PH khususnya ketua I. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan informan sebagai berikut:

Kalau evaluasi di IQMA itu ada .. yang memang itu sudah agenda bulanan dalam artian yang setiap satu bulan sekali yang diadakan oleh DP2K, terus yang diadakan sama PH itu triwulan dan di akhir nanti juga ada musyawarah tahunan IQMA, dan dimana di musyawarah tahunan IQMA itu





(...) kalau dari satu kepengurusan kemarin itu yang .. bulanan .. itu Alhamdulillah udah terlaksana, cuma ya terlaksananya ya sesuai sama masuknya waktu .. ee UKM itu tadi. Kalau misalkan waktu liburan kan jadi tidak ada. Jadi .. tetep ada.(I.4)

(...) Mungkin ini apa tanggal pelaksanaannya aja kurang sesuai karena faktor-faktor tertentu misalnya ada kegiatan di IQMA jadinya diundur atau gimana gitu.(...) Kalau prosedur yang ada di IQMA ya misalnya .. mengenai pelaksanaannya .. evaluasi bidang sendiri itu dilaksanakan tiap bulan di minggu ke empat (...) Kemudian untuk yang triwulan itu kan dilaksanakan selama tiga bulan ee selama tiga kali tiap tiga bulan sekali, yaitu triwulan satu triwulan dua, dan triwulan tiga. Kemudian yang MTI itu dilaksanakan di akhir kepengurusan.(I.6)

Informan 2, 4, dan 6 tersebut menjelaskan, bahwa pelaksanaan evaluasi kinerja harus diperhitungkan dengan matang terkait dengan lokasi dan waktu. Informan kedua menjelaskan tentang lokasi dan momen. Pelaksanaan evaluasi kinerja harus memiliki lokasi yang strategis. Berdasarkan pengamatan peneliti, evaluasi bulanan dan triwulan diadakan di area kampus. Pelaksanaan evaluasi bulanan umumnya dilaksanakan pada sore hari sampai malam hari. Pelaksanaan tersebut sering dilakukan di belakang Gedung Twin Tower UIN Sunan Ampel Surabaya atau di depan Gedung Fakultas Hukum. Pelaksanaan evaluasi bulanan biasanya mengalami kemoloran. Hal tersebut dikarenakan adanya bentrokan dengan jadwal kegiatan IQMA yang lainnya.

Pemilihan lokasi evaluasi kinerja sangat penting, karena evaluasi kinerja harus jauh dari keramaian. Sehingga, penyampaian hasil kerja pengurus dapat dilakukan dengan maksimal. Sedangkan, evaluasi kinerja triwulan juga dilakukan di area kampus. Evaluasi triwulan umumnya dilaksanakan pada pagi hari sampai malam hari. Berdasarkan pengamatan peneliti, pelaksanaan evaluasi triwulan dilaksanakan di depan Gedung perpustakaan dan Gedung Fakultas Ushuluddin. Kemudian, evaluasi musyawarah tahunan IQMA dilaksanakan selama empat hari. Oleh karena itu, MTI dilaksanakan di luar area kampus. Sebab, kampus tidak dapat digunakan, apabila evaluasi dilakukan selama empat hari *non stop*. Selama dua tahun, pelaksanaan MTI dilakukan di Gedung Setia Aswaja daerah Wage Sidoarjo. MTI merupakan evaluasi tahunan yang pelaksanaannya paling besar. Selain dilakukan selama empat hari, MTI juga dilakukan selama 24 jam dengan durasi istirahat ketika ishoma saja. Hal tersebut dikarenakan, pelaksanaan MTI merupakan laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu tahun kepengurusan. Pelaksanaan evaluasi kinerja terkadang juga mengalami pergeseran jadwal. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan informan keenam. Pergeseran jadwal tersebut dikarenakan ada beberapa kegiatan IQMA yang memiliki jadwal sama. Sehingga, pelaksanaan evaluasi kinerja mengalami kemunduran jadwal.

Masing-masing jenis evaluasi tersebut memiliki tim yang berbeda-beda. Pelaksanaan evaluasi bulanan tidak dihadiri oleh seluruh pengurus IQMA. Namun, evaluasi tersebut hanya dihadiri oleh DP2K, ketua I, dan perwakilan pengurus bidang. Sedangkan, evaluasi triwulan dan MTI wajib dihadiri oleh seluruh





kepengurusan itu yawis udah deal kosong-kosong gitu.(I.4)

Prosedrn .. sesuai dengan pengevaluasiannya yang setiap ... setiap satu bulan satu kali kita mendatangkan bidang dan ketua 1 selaku internalnya, dan disaat tiga bulan tersebut kita evaluasi kembali di triwulan tersebut dan pada saat MTI yang tadi pada satu tahun satu kali itu kita bekerja membahas tentang AD/ART terlebih dahulu baru mengevaluasi terhadap kinerja kepengurusan tersebut.(I.5)

Menurut informan 1, 2, 3, 4, dan 5, evaluasi dimulai dari tahap evaluasi bulanan. Evaluasi bulanan tersebut digunakan untuk membahas permasalahan yang terjadi pada bidang terutama pengurusnya. Pada saat evaluasi bidang, koordinator dan pengurus internal bidang wajib hadir. Namun, apabila salah satu berhalangan, maka pengurus lainnya boleh menggantikan. Biasanya, evaluasi bulanan digunakan untuk mengklarifikasi permasalahan yang terjadi. Hal tersebut dikarenakan, evaluasi bulanan dikhususkan untuk kepentingan bidang. DP2K dan ketua I membantu bidang untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sehingga, hal tersebut dapat dijadikan bekal pada saat evaluasi triwulan. Hal itu diharapkan, agar permasalahan bidang sudah terselesaikan pada saat pelaksanaan evaluasi triwulan.

Kemudian, evaluasi selanjutnya adalah evaluasi triwulan. Pada saat evaluasi triwulan, permasalahan bidang diharapkan sudah terselesaikan dengan bantuan evaluasi bidang. Namun, apabila permasalahan tersebut belum terselesaikan, maka semua forum evaluasi triwulan dapat membantu

memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Berdasarkan pengamatan peneliti, semua lini kepengurusan diwajibkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban selama tiga bulanan. Hal tersebut digunakan untuk bahan evaluasi triwulan. Teknisnya, pengurus membacakan laporan pertanggungjawaban tersebut pada saat mendapat giliran presentasi. Presentasi tersebut dilakukan oleh masing-masing lini, seperti pengurus bidang, departemen, dan PH. Laporan pertanggungjawaban tersebut digunakan untuk melihat hasil kerja dengan rencana kerja yang telah ditentukan. Evaluasi tahunan atau MTI juga memiliki teknis yang sama seperti evaluasi triwulan. Namun, pelaksanaan MTI memiliki ranah yang lebih luas. Pada saat pelaksanaan MTI, evaluasi kinerja dihadiri oleh alumni dan Dewan Pertimbangan IQMA (DPI). Alumni dan DPI selaku penilai tambahan ikut membantu memberikan solusi untuk IQMA masa depan. Selain itu, alumni dan DPI juga menguji kejujuran kinerja pengurus tiap bidang, departemen, atau PH. Pelaksanaan evaluasi triwulan dan MTI berbeda dengan evaluasi bulanan.

Evaluasi bulanan hanya dapat dikoreksi oleh beberapa pengurus saja. Hal itu dikarenakan, evaluasi bulanan tidak dihadiri oleh semua pengurus. Sedangkan, evaluasi triwulan dan MTI, semua pengurus diperbolehkan untuk saling mengoreksi. Dalam pelaksanaannya, evaluasi kinerja di IQMA menggunakan sumber atau metode penilaian dari atasan dan 360 derajat atau segala sumber. Pengumpulan data terkait penilaian kinerja pengurus hanya dapat dilakukan oleh atasan, yaitu ketua I. Ketua I tersebut dibantu oleh DP2K. Namun, saat di forum pelaksanaannya, evaluasi kinerja di IQMA menggunakan sumber penilaian 360 derajat. Dalam

hal ini, semua pengurus dapat saling memberi evaluasi kepada sesama pengurus. Hal tersebut telah dijelaskan oleh informan kedua. Selanjutnya, pernyataan tersebut juga didukung oleh informan 4 dan 6 sebagai berikut:

Kalau di IQMA itu ya bukan otoriter juga jadi ya sama-sama bisa sama-sama bisa mengeval lha kalau misalkan itu tadi di evaluasi bidang yang satu bulan itu kan hanya yang ada di situ hanya bidang, pengurus bidang, pengurus DP2K, ketua 1 sama ketua umum. Nah di situ itu misalkan ada yang salah yawis saling .. saling apa ya sharing kalau misalnya ada yang salah saling mengingatkan gitu itu disitu. Nah sama sih sama juga sama yang triwulan, MTI juga gitu jadi pokoknya kalau di forum itu biasanya di IQMA itu tidak ada kata ini itu ketum ini itu ketua 1 ketua 2 nggak ada kalau di .. di forum. Jadi kalau misalnya dia .. meskipun ketua umum punya masalah ya itu nanti dibahas nanti sama-sama diingatkan gitu.(I.4)

Kalau di eval bidang itu jadi kita selaku DP2K mengeval mengevaluasi .. pengurus bidang. Jadi dari .. ee yang bisa mengevaluasi itu dari kita ke pengurus bidang dan juga dari .. ketua 1 juga bisa. Kemudian kalau di triwulan itu kita menge ..evaluasi bersama-sama jadinya ee misalnya ya pengurus DP2K yang maju menyampaikan mengenai hasil kerjanya selama tiga bulan pertama, nah itu nanti seluruh ang seluruh peserta dari pengurus IQMA itu bisa menyampaikan masukan atau saran-sarannya kayak gitu. (...) Iya di MTI juga sama seluruh pengurus juga bisa





Kalau masalah yang sering terjadi itu .. ee yang pertama itu yang berkaitan dengan keaktifan pengurus sendiri dalam artian ada beberapa pengurus yang .. tidak aktif, nah itu dievaluasi bidang kita evaluasi kita kita gali ada permasalahan apakah dengan si fulan itu tadi kenapa kok tidak bisa aktif dan tidak bisa bertanggungjawab atas tanggungjawab yang sudah didapatkan di IQMA.(I.1)

Eee kebanyakan masih problem yang sering kita hadapi dan bahkan mungkin setiap tahunnya juga ya ee kalau lingkup pengurus ee ada beberapa pengurus yang kurang aktif dalam kinerja itu pasti selalu ada, karena memang 80 sekian pengurus itu nggak bisa di back up semuanya semual loyal itu kadang juga nggak bisa, (...) yang kedua biasanya ada problem-problem yang lain lah sesuai dengan ee ss periodenya.(I.2)

(...) kendala dari pengurus itu mengenai anggota baik anggota baru di IQMA maupun anggota pengurusnya, yaa mungkin bagi saya itu seleksi alam. Ya banyak pengurus yang hilang amanah nah jadi itu termasuk suatu kendala bagi kepengurusan IQMA tersebut apalagi di anggota, keaktifan anggota itu sangat dipertaruhkan nanti di evaluasi juga seperti itu.(I.3)

Dari penjelasan informan 1, 2, dan 3 menunjukkan, bahwa bentuk permasalahan yang terjadi adalah menurunnya kinerja pengurus. Pengurus tersebut kurang aktif mengikuti kegiatan di organisasi IQMA. Hal tersebut dilihat dari kondisi nyata selama kepengurusan. Pengurus yang tidak aktif





Salah sa .. terus ada lagi kalau .. saat seumpama kurikulum. Di kurikulum ada bidang saumpama bidang dakwah yang tidak sesuai dengan kurikulum saa .. waktu musyker penyerahan kurikulum tersebut, setelah musyker setelah musyker kan ada penyerahan kurikulum yang akan dikerjakan dalam satu tahun. Nah, tetapi dalam kurikulum tersebut ada beberapa bidang yang tidak sesuai dengan kurikulumnya.(I.5)

(...) misalnya kan di .. apa di IQMA kan ada lima bidang. Saya contohkan yang dibidang kaligrafi aja ya, nah misalnya salah satu permasalahannya yaitu ee .. guru atau yang mengoreksi setorannya anggota IQMA itu berhalangan hadir.(I.6)

Informan 2, 5, dan 6 menjelaskan permasalahan yang terjadi pada kepengurusan saat ini. Contoh permasalahan tersebut berkaitan dengan mis komunikasi penentuan delegasi, kerancuan penggunaan kurikulum per bidang, dan permasalahan pelaksanaan program kerja. Permasalahan pelaksanaan program kerja biasa terjadi pada kepengurusan IQMA. Hal tersebut dikarenakan, pelaksanaan program kerja menyangkut beberapa orang. Permasalahan yang dibahas saat evaluasi berkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan program kerja tersebut. Umpan balik akan lebih efektif, apabila umpan balik diikuti dengan penerapan fungsinya. Umpan balik memiliki dua fungsi, yaitu instruksional dan motivasional. Fungsi tersebut dapat digunakan sebagai pendekatan dalam menindaklanjuti permasalahan. Hal tersebut disampaikan oleh beberapa informan sebagai berikut:









kualitas kerjanya. Informan kedua juga menjelaskan, bahwa pengurus akan dimintai klarifikasi berkaitan dengan permasalahan tersebut. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan informan 3, 4, 5, dan 6, bahwa pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dilakukan dengan mengklarifikasi pada pengurus. Pengurus diberi pertanyaan mengenai kelemahan kerjanya. Hal itu dilakukan dengan mengajak bertemu langsung atau melalui pesan online. Sebelum mengajukan pertanyaan, pengurus diajak berbincang-bincang, agar pengurus merasa tenang dan tidak canggung. Pertanyaan yang diajukan berkenaan dengan alasan menurunnya kinerja pengurus tersebut. Hal tersebut dilakukan, agar pengurus mendapatkan solusi yang tepat untuk permasalahannya. Selain dengan bertemu dan *personal chat*, pendekatan juga dilakukan dengan mengadakan acara kekeluargaan, seperti rujakan dan ngopi bareng. Biasanya, pengurus akan terbuka setelah berkumpul bersama dengan ketua umum, ketua I, maupun DP2K. Selain itu, acara kumpulan tersebut juga dapat merekatkan keharmonisan dengan pengurus bidangnya. Keharmonisan berguna untuk pengurus bisa saling terbuka satu sama lain. Keharmonisan tersebut juga dapat mencairkan suasana menjadi hangat. Suasana nyaman juga dapat membuat pengurus menjadi loyal kepada organisasi. Tentunya, suasana tersebut akan mengurangi permasalahan penurunan kinerja pengurus.

Setelah mengetahui sebab penurunan kinerja tersebut, pengurus diberi solusi untuk perbaikan kerjanya. Pengurus diberi masukan-masukan yang bersifat membangun, sehingga pengurus tidak merasa sakit hati ketika diberi masukan. Motivasi tersebut berisi tentang kualitas kinerja yang baik. Selain itu,

pengurus juga diberi petunjuk tentang pentingnya menjaga amanah. Hal tersebut dilakukan, agar pengurus bisa mengemban tanggung jawab lagi dengan baik. Pengurus disadarkan akan tugas yang telah diamanahkan kepadanya. Motivasi tersebut disampaikan untuk memberikan kegembiraan kepada pengurus, supaya pengurus merasa dianggap keberadaannya. Berdasarkan pengamatan peneliti pada saat evaluasi akbar atau MTI, motivasi juga diberikan kepada pengurus yang memiliki kualitas kinerja baik. Hal tersebut dilakukan dengan memberi pujian kepada pengurus tersebut.

## **2. Kriteria Evaluasi Kinerja Pengurus Organisasi Ikatan Qori' Qori'ah Mahasiswa (IQMA) UIN Sunan Ampel Surabaya**

Standar pelaksanaan evaluasi kinerja merupakan patokan yang digunakan dalam menilai kinerja pengurus. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja, IQMA memiliki standar penilaian kinerja, yaitu berdasarkan hasil (*product based criteria*) dan kemampuan pengurus (*people based criteria*). Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, evaluasi kinerja di organisasi IQMA dilakukan berdasarkan hasil kerja dari masing-masing pengurus. Hasil kerja tersebut juga berupa hasil pelaksanaan program kerja yang telah disusun. Program kerja yang mengalami kendala dalam pelaksanaannya mengidentifikasi, bahwa kinerja pengurus kurang maksimal. Menurunnya kinerja pengurus juga dapat terlihat dari keaktifan pengurus dalam mengikuti kegiatan di IQMA. Keaktifan pengurus juga dapat digunakan untuk menilai kemampuan pengurus dalam berorganisasi. Hal tersebut dijelaskan oleh informan 2 dan 6 sebagai berikut:

Kalau pengurus begini yang pasti kriterianya yang pertama dia harus aktif baik dalam jobdisknya dan juga ee intensitas terlihatnya dia di IQMA kayak gitu, kadang begini ada .. ada yang eee dia itu masih pegang jobdisknya cuma dia itu jarang keliatan di IQMA, entah itu dia hanya mau ngeback up bimsus pribadi sehingga jarang ada yang liat atau gimana .. dan lain sebagainya. Yang kedua ada kriteria ee kepanitiaan, jadi pengurus itu juga selain mengayomi anggota dia juga harus aktif dalam kegiatan-kegiatan IQMA termasuk kepanitiaan dan lain sebagainya, nah biasanya kriterianya di dua itu, yang pertama mengenai ee seberapa mback up dia di jobdisk pengurus tadi, yang kedua ee di organisasinya kayak gimana kegiatan-kegiatan IQMA kayak gimana, dua itu ...(I.2)

Jadi mengenai kriteria dalam pelaksanaan evaluasi kerja seperti ini misalny .. eek an setiap pengurus kan memiliki tugas masing-masing eee dari pengurus departemen, PH, pengurus bidang itu kan tugasnya berbeda-beda, yang sudah kita .. yang sudah dibahas di awal ee .. di AD/AR .. AD/ART IQMA, nah di evaluasi bidang ini kan dilaksanakan untuk mengeval atau menilai kinerjanya mereka selama kurun waktu tertentu kan, nah kriterianya itu ya kembali ke tugasnya mereka, apakah dilaksanakan dengan baik atau kayak gimana kalau kurang misalnya tidak sesuai atau kurang sesuai, nah nanti kita kasih saran itu tadi.(I.6)

Dari penjelasan informan 2 dan 6, IQMA memiliki kriteria atau standar dalam pelaksanaan evaluasi kinerja. Standar tersebut yang dijadikan patokan untuk menilai

dan memperbaiki kinerja pengurus. Informan 2 dan 6 menjelaskan, bahwa kriteria penilaian kinerja dilihat berdasarkan hasil kerja pengurus berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dan keorganisasian. Kriteria tersebut digunakan untuk melihat kualitas kinerja dan kelayakan pengurus pada organisasi IQMA. Kriteria tersebut dilihat berdasarkan kinerja pengurus yang berkaitan dengan tugasnya. Hal tersebut dapat menjelaskan apakah kinerja pengurus sudah sesuai dengan standar masa lalu atau belum. Sebab, kinerja pengurus merupakan sesuatu yang krusial dalam organisasi. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan kriteria berdasarkan hasil. Dari awal pembentukan struktur kepengurusan, pengurus sudah diberikan pemahaman tentang definisi tugas pokok dan fungsi tiap jabatan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam mengemban tanggung jawab. Pemahaman tugas tersebut juga berkaitan dengan program kerja yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, kriteria penilaian juga didasarkan pada hasil program kerja. Kriteria tersebut melihat hasil dari realisasi program kerja. Apabila program kerja berhasil dilaksanakan secara maksimal, maka kinerja pengurus dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan program kerja. Hasil program kerja dapat dilihat dari hasil pengamatan ketua I dan DP2K. Hasil kerja tersebut juga dapat dilihat berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang ditulis oleh masing-masing lini kepengurusan. Berdasarkan pengamatan peneliti, contoh hasil kerja pengurus adalah terlaksananya program kerja sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Apabila rencana kegiatan bimbingan khusus dilaksanakan sebanyak empat kali dalam seminggu, namun realitanya

bimbingan khusus hanya dilaksanakan tiga kali dalam seminggu. Hal tersebut membuktikan, bahwa hasil kerja pengurus dalam mengelola kegiatan bimbingan khusus dinyatakan tidak maksimal. Adapun contoh kinerja pengurus adalah pengeksekusian tugas. Seorang koordinator memiliki tugas untuk mengawasi bawahannya dan jalannya program kerja. Namun, koordinator tersebut jarang mengikuti dan mengawasi kinerja bawahannya dalam mengelola program kerja. Nantinya, hal tersebut akan dibenahi pada saat evaluasi kinerja. Dalam hal ini, kriteria evaluasi kinerja dapat digunakan untuk patokan dalam memperbaiki kinerja pengurus.

Selain kriteria tersebut, pelaksanaan penilaian kinerja di IQMA juga memiliki kriteria mengenai kemampuan berorganisasi pengurus. Kriteria tersebut berkaitan dengan keaktifan pengurus terhadap organisasi. Hal tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan berorganisasi pengurus. Kemampuan berorganisasi tersebut dapat tercermin dari kelayakan pengurus terhadap kegiatan organisasi. Kelayakan pengurus dapat dilihat dari kontribusinya pada semua kegiatan IQMA. Biasanya, pengurus yang tidak loyal cenderung malas untuk mengikuti kegiatan. Padahal, kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang penting. Dalam hal ini, pengurus yang memiliki sikap loyal akan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kemampuan berorganisasi dapat berpengaruh pada kekuatan organisasi. Semakin banyak pengurus memiliki kemampuan berorganisasi, maka kekuatan organisasi tersebut semakin meningkat. Dalam organisasi, kelayakan pengurus sangat dibutuhkan untuk mengelola

organisasi. Hal itu dikarenakan, pengurus merupakan sumber daya manusia yang menjalankan organisasi. Berikut penjelasan informan kedua mengenai kriteria kemampuan pengurus dalam berorganisasi.

(...) ketika dia contoh kasusnya adalah ketika dia nggak aktif dan jarang kelihatan di IQMA, kita lihat di jadwal piketnya gimana kita pantau ketika dia piket ada atau nggak, dan kita juga ee ada jadwal stay kantor dari PH untuk memantau pengurus siapa aja yang biasanya mampir di kantor ee bantu-bantu di kantor, nyiapin bimsus rutinitas dan lain sebagainya itu akan dilihat,(I.2)

Menurut informan kedua, kriteria kemampuan berorganisasi dilihat berdasarkan kelayakan pengurus terhadap organisasi. Hal tersebut dapat dilihat dari intensitas kontribusinya dalam mengayomi organisasi. Ketua I akan melakukan pengamatan kepada pengurus. Pengamatan tersebut digunakan untuk melihat keikutsertaan pengurus dalam mengelola program kerja organisasi. Masing-masing pengurus diberi tanggung jawab untuk piket benah kantor. Hal tersebut dilakukan untuk menguji kelayakan pengurus. Dari hal tersebut, ketua I selaku internal pengurus dapat mengetahui siapa saja yang tanggung jawab dengan tugasnya. Berdasarkan pengamatan peneliti sebagai salah satu mantan pengurus di organisasi IQMA, kemampuan pengurus dalam berorganisasi juga dapat dilihat dari keikutsertaan pengurus dalam rapat-rapat tertentu. Pengurus yang memiliki kemampuan berorganisasi dengan baik akan menyumbangkan pemikirannya dan merelakan

















atau Musyawarah Tahunan IQMA (MTI). Pelaksanaan evaluasi kinerja di IQMA menggunakan dua metode evaluasi, yaitu dari atasan dan 360 derajat. Pada saat melakukan penilaian untuk mencari data, penilaian hanya dilakukan oleh ketua I dan DP2K selaku penanggung jawab evaluasi. Namun, penilaian dapat dilakukan oleh semua pengurus, alumni, pembina, maupun Dewan Pertimbangan IQMA (DPI) ketika saat forum pelaksanaan evaluasi kinerja saja. Pelaksanaan evaluasi kinerja di IQMA melakukan pengumpulan data dengan metode tes dan non tes. Pengumpulan data dengan tes diperoleh dari hasil penilaian menggunakan formulir. Formulir penilaian berkaitan dengan kinerja pengurus. Dalam hal ini, penilaian dilakukan saat mengawasi rutinitas maupun bimbingan khusus. Sedangkan, pengumpulan data dengan non tes diperoleh dari isu-isu yang beredar. Informasi tersebut diperoleh baik dari internal maupun eksternal organisasi. Informasi tersebut berkaitan dengan kinerja pengurus. Pelaksanaan evaluasi kinerja organisasi IQMA wajib dihadiri oleh semua pengurus, kecuali evaluasi bulanan hanya dihadiri oleh perwakilan pengurus bidang, yaitu ketua I, DP2K, koordinator pengurus bidang dan pengurus internal bidang. Selain itu, pelaksanaan evaluasi tahunan atau MTI juga dihadiri oleh alumni, Dewan Pertimbangan IQMA (DPI), dan pembina IQMA. Dalam pelaksanaannya, semua pengurus dapat memberikan penilaian dan solusi untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Khusus pelaksanaan MTI, alumni, DPI, maupun pembina IQMA juga diperbolehkan untuk memberikan penilaian dan solusi untuk kinerja pengurus. Pelaksanaan evaluasi kinerja dapat mengidentifikasi















- Rahmayanti, "Analisis Sistem Penilaian Kinerja Karyawan dengan Menggunakan Metode 360 Derajat", *Jurnal Sekretari*, vol. 5, no. 2, 2018
- Tunggul, Adi Mora, Isnanto, R. Rizal, & Nurhayati, Oky Dwi, "Evaluasi Kinerja Organisasi Publik dengan Menggunakan Pendekatan Balanced Scorecard dan Analytic Network Process", *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, vol. 6, no. 2, 2016
- Reswan, Yuza & Prabowo, Dedy Agung, "Sistem Pendukung Keputusan Evaluasi Kinerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan Menggunakan Simple Additive Weighting Method", *Jurnal Media Infotama*, vol. 14, no. 2, 2018
- Nugraha, Ariadi & Rohiman, Iman, "Measure : Alternatif Model Evaluasi Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling Di Sekolah", *Jurnal Prosiding Seminar Bimbingan dan Konseling*, vol. 1, no.1, 2017
- Adi, Nelfia, "Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol. 16, no. 3, 2010
- Ayun, Qurrotu, "Penilaian Kinerja (Performance Appraisal) Pada Karyawan Di Perusahaan", *Jurnal Majalah Ilmiah Informatika*, vol. 2, no. 3, 2011
- Siregar, Mia Juliana, "Rancang Model Penilaian Kinerja Karyawan dengan Metode 360 Degree Di Departemen Wirehouse", *Jurnal Profisiensi*, vol. 6. No, 1, 2018
- Muryadi, Agustanico Dwi, "Model Evaluasi Program dalam Penelitian Evaluasi", *Jurnal Ilmiah PENJAS*, vol. 3, no. 1, 2017
- Brilliantina, Aulia, Purnomo, Bambang Herry, & Suryaningrat, Ida Bagus, "Review: Pendekatan Penilaian Kinerja Agroindustri The Menggunakan Model Sistem Dinamik", *Jurnal Agroteknologi*, vol. 10, no. 2, 2016
- Wijayanti, Annisa & Wimbarti, Supra, "Evaluasi dan Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Pada PT HKS", *Jurnal Psikologi Undip*, vol. 11, no. 2, 2012

- Retnowati, Trie Hartiti, Mardapi, Djemari, Kartowagiran, Badrun, dan Suranto, "Model Evaluasi Kinerja Dosen : Pengembangan Instrumen Untuk Mengevaluasi Kinerja Dosen", *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, vol. 21, no. 2, 2017
- Setyarini, Ika Wahyu, "Pengaruh Pengawasan, Evaluasi, dan Audit Kinerja Karyawan Terhadap Loyalitas Anggota BMT Berkah Trenggalek", *Jurnal An-Nisbah*, vol. 3, no. 1, 2016
- Lina, "Pengaruh Penilaian Kinerja terhadap Kinerja Karyawan dengan Budaya Organisasi sebagai Variabel Intervening", *Jurnal Akuntansi*, vol. 8, no. 2, 2016
- Trisabekti, Bambang, "Pengaruh Evaluasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan (Studi Empiris pada Bank Pengkreditan Rakyat Syari'ah Margirizki Bahagia Yogyakarta)", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2014
- Rani, Indria Hagga & Mayasari, Mega, "Pengaruh Penilaian Kinerja terhadap Karyawan dengan Motivasi sebagai Variabel Moderasi", *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, vol. 3, no. 2, 2015
- Pratama, Muhammad Faqih, "Sejarah Perkembangan UKM IQMA (Ikatan Qori' Qori'ah Mahasiswa) dan Pengaruhnya Terhadap Senin Tilawah Al-Qur'an di UIN Sunan Ampel Surabaya", *Skripsi*, Surabaya: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019
- Nawawi, Hadari, *Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006
- Fatimah, Fajar Nur'aini Dwi, 2017, *Panduan Praktis Evaluasi Kinerja Karyawan*, Yogyakarta: PT. Anak Hebat Indonesia
- Rivai, Veitzhal & Basri, Ahmad Fauzi Muhd., *Performance Appraisal*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

- Ulfatin, Nurul & Triwiyanto, Teguh, *Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016
- Daryanto dan Bintoro, *Manajemen Diklat*, Yogyakarta: Gava Media, 2014
- Bastian, Indra, *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*, Jakarta: Erlangga, 2007
- Budiharto, Sus dan Fahmie, Arief, “Evaluasi Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Administratif Tetap Universitas Islam Indonesia Yogyakarta”, *Jurnal Psikologika*, vol. 13, no. 7, 2002
- Setiobudi, Eko, “Analisis Sistem Penilaian Kinerja Karyawan Studi Pada PT. Tridharma Kencana”, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Terapan*, vol. 3, no. 3, 2017
- Widyasari, Made, “Hubungan Sikap Karyawan dengan Motivasi Kerja dan Prestasi Kerja”, *Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis, dan Kewirausahaan*, vol. 7, no. 1, 2013
- Wibowo, *Manajemen Kinerja*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2016
- Yusuf, Burhanuddin, *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015
- Septiani, Ulfah, “Sistem Informasi Penilaian Kinerja Karyawan dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW) DAN 360 Derajat Pada PLTD/G Tarahan Bandar Lampung”, *Skripsi*, Bandar Lampung: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung, 2017
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016
- Bachri, Bachtiar, S., “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, vol. 10, no. 1, 2010
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007

